

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UMI SUMBULAH**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **839974**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.140.000.000**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
4. Tanah Seluas 2310 m2 di KAB / KOTA BLITAR, WARISAN Rp. 325.000.000
5. Tanah Seluas 1280 m2 di KAB / KOTA BLITAR, WARISAN Rp. 425.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/65 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 186.700.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000



2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	88.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	949.342.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.364.042.000
III. HUTANG	Rp.	350.250.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.013.792.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.